

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Penelitian

Mata Kuliah Wajib Kurikulum (MKWK) dalam konteks Pendidikan Umum (*General Education*) yang dalam penelitian ini lingkupnya dibatasi pada Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi paripurna yakni sebagai kerangka membentuk watak dan keadaban mahasiswa yang bermartabat (Keputusan DIRJEN DIKTI No. 84/E/KPT/2020). Fungsi tersebut menekankan betapa pentingnya pendidikan karakter dalam kerangka pembangunan nasional, yakni membentuk sumber daya manusia yang berkarakter, berbudaya, dan beradab sesuai dengan nilai-nilai luhur ideologi Pancasila melalui pengembangan dan pembinaan kematangan sikap, perilaku, kemampuan berpikir maupun keterampilan *soft skill* lainnya dengan harapan mahasiswa mampu berpartisipasi dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik demi mencapai kesejahteraan dan keamanan bangsa (Nurdin, 2017 & 2016: 11; Alawiyah, 2012: 92; Putra, 2017: 50; Dineen, 2018: 1; Bates, 2019: 1; Peterson, 2019: 1; Watson, 2019: 303; Affandi & Darmawan, 2021: 472; Dahliyana et al., 2021: 368). Namun, tidak semua perguruan tinggi di Indonesia memiliki kemampuan dan keinginan untuk melaksanakan MKWK sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Hal demikian terjadi karena beberapa perguruan tinggi mengimplementasikan kebijakan MKWK dengan strategi yang berbeda (Nurdin & Dahliyana, 2018: 427; Reichert & Torney-Purta, 2019: 112). Implementasinya seringkali tergantung pada keinginan dan motivasi pribadi pemegang kuasa, sehingga keberadaan MKWK dianggap kurang berpengaruh terhadap pembentukan karakter warga negara (Maloyed, 2015; Campbell, 2019: 1). Bahkan di beberapa negara, Pendidikan Umum ini dianggap sebagai “anak tiri” dalam kurikulum Pendidikan Tinggi (Hooghe & Oser, 2015: 2; Campbell, 2019: 1). Selain itu, MKWK dalam konteks Pendidikan Umum sering terbatas pada pengajaran teori dan pengetahuan yang harus dihafal (Rodríguez, 2018: 528). Keadaan tersebut

masih dibebani dengan tujuan implementasi MKWK dalam membentuk dan membina karakter mahasiswa yang *notabene* bukanlah hal mudah. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti kemampuan dosen, motivasi mahasiswa, materi ajar, ketersediaan fasilitas, lingkungan sosial dan politik, serta partisipasi masyarakat (Affandi & Somantri, 2020: 545). Semua ini memengaruhi tingkat motivasi mahasiswa untuk mengikuti MKWK dan melihat relevansinya dengan bidang studi mereka (Nurdin & Dahliyana, 2018: 427). Dalam tataran praktis, tuntutan orang tua dan mahasiswa yang memandang gaji alumni sebagai fokus utama dari gelar sarjananya (Senter & Spalter-Roth, 2020: 10), sehingga orientasi perkuliahan adalah nilai bukan *soft skills*.

Keadaan demikian mengarahkan mahasiswa pada hal-hal yang kurang pantas sebagai kaum akademisi. Hal tersebut dapat dilihat dari survey yang dilakukan *Little Circle Foundation* (2015) terhadap 344 mahasiswa di salah satu Universitas, di mana 92,7% mahasiswa pernah mencontek saat ujian. 59,7% mahasiswa merasa biasa saja setelah melakukan perilaku mencontek tersebut. Kemudian data riset secara kualitatif menyatakan bahwa bibit-bibit penyimpangan yang akan merusak karakter bangsa terjadi pada ranah akademik, seperti pabrikan proposal penelitian dan plagiarisme tugas kuliah (Alfaqi dkk., 2021: 210). Padahal mereka memahami materi Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan, serta menganggap pendidikan karakter di perguruan tinggi sangat penting, tetapi dalam praktik terkecil sehari-hari implementasinya masih sangat kurang (Hikmah & Dewi, 2021: 417).

Memperhatikan fenomena di atas, hal tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja karena mahasiswa merupakan tumpuan masa depan bangsa yang akan memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh sebab itu, penting untuk mengkaji kembali implementasi kebijakan MKWK yang telah diimplementasikan selama ini. Penelitian perihal implementasi kebijakan pernah dilakukan oleh Nurdin (2016: 11) yang fokus pada konten variabel implementasi kebijakan publik dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia, dilihat dari sudut pandang variabel implementasi kebijakan publik menurut G.C. Edward III (1980). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa cakupan dan kedalaman bahasan dalam konten variabel implementasi

kebijakan publik, yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, sikap atau disposisi, dan struktur birokrasi, dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi masih belum ideal. Secara kualitatif, variabel "komunikasi" dan variabel "sumber daya" masih kurang mendalam. Sementara itu, konten tentang "sikap atau disposisi" dan variabel "struktur birokrasi" dianggap sudah cukup komprehensif. Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa distribusi konten dalam dimensi implementasi kebijakan publik dalam Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi masih belum memadai. Hal ini bisa mempengaruhi kesiapan mahasiswa untuk memiliki pemahaman dan keterampilan yang diperlukan dalam berpartisipasi dalam implementasi kebijakan publik, yang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung agar konten dalam dimensi implementasi kebijakan publik dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi di Indonesia (Nurdin, 2016: 11). Pada penelitian ini juga akan mengkaji dengan Ilmu Kebijakan Publik dalam pengimplementasian MKWK termasuk Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembinaan karakter mahasiswa, tetapi perbedaannya terletak pada penggunaan teori yakni yang berasal dari Merilee S. Grindle.

Dengan demikian penelitian ini penting, karena mengimplementasikan MKWK khususnya Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina karakter mahasiswa dianggap sebagai solusi terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup bangsa dengan harapan mereka mampu berperan dan berfungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan sebagai persiapan dalam menyambut "Indonesia Emas 2045" (Affandi & Somantri, 2020: 541; Aulia & Dewi, 2021: 43; Pratama, 2020: 22; Rahim, 2018: 18). Karena, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki fungsi sebagai penguatan karakter mahasiswa dalam aktualisasi nilai-nilai agar tidak menyimpang dari dasar-dasar negara yang telah ditetapkan melalui pengenalan konten dan keterampilan dasar yang mengarahkan pada peningkatan kesadaran kebangsaannya (Nurdin, 2016: 11; Maloyed, 2015: 1; Méndez-García et al., 2021: 1). Selain itu, dengan pengimplementasian MKWK, diharapkan mahasiswa mampu memiliki karakter yang dapat mempresentasikan kepribadian

bangsa Indonesia (Clark, 2016: 1; Knowles, 2017: 1; Ngozwana, 2017: 1; Literat, & Vilenchik, 2018: 1). Oleh karena, dalam kategori yang lebih besar, implementasi MKWK di Indonesia masuk pada tataran kewarganegaraan transformatif di mana mahasiswa diajarkan untuk mampu menerapkan dan mempromosikan kebijakan, tindakan, dan perubahan yang konsisten dengan jati diri bangsanya (Banks, 2017: 367).

Agar penelitian ini memiliki fokus yang jelas, maka lokasi penelitiannya dibatasi di Provinsi Jawa Barat dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut seringkali menjadi tujuan mahasiswa dari berbagai daerah untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta dan merupakan provinsi yang memiliki jumlah perguruan tinggi terbanyak di Indonesia. Selain itu, di Provinsi Jawa Barat juga memiliki berbagai realitas sosial yang kompleks baik dari segi konteks masyarakat, masalah yang sedang dialami, arah kebijakan, dan hal lain yang selaras dengan implementasi pendidikan. Dengan demikian, akan sangat menarik bila penelitian tentang implementasi kebijakan MKWK dalam pembinaan karakter mahasiswa yang dilaksanakan pada Perguruan Tinggi di Jawa Barat dikaji dalam disertasi ini. Oleh sebab itu, judul yang diangkat dalam disertasi ini adalah “implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam pembinaan karakter mahasiswa”.

1.2.Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, secara umum rumusan masalah yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini ialah “Bagaimana implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi di Jawa Barat?”

Secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian yang berdasar kepada teori implementasi Merilee S. Grindle (1980) yaitu:

- 1.2.1. Bagaimana konten kebijakan dari Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi?
- 1.2.2. Bagaimana konteks kebijakan dari Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi?

- 1.2.3. Bagaimana proses implementasi kebijakan dari Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi?
- 1.2.4. Bagaimana efektifitas ketercapaian (*outcomes*) implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Perguruan Tinggi terhadap Penguatan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1. Umum

Tujuan diadakannya penelitian ini secara umum ialah untuk melakukan memperoleh gambaran yang mendalam tentang implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam pembinaan karakter mahasiswa di Perguruan Tinggi Provinsi Jawa Barat.

1.3.2. Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus yaitu berupaya untuk:

- 1.3.2.1. mendeskripsikan konten kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- 1.3.2.2. mendeskripsikan konteks kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- 1.3.2.3. menganalisis proses implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam Pembinaan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi;
- 1.3.2.4. menganalisis efektifitas ketercapaian (*outcomes*) implementasi kebijakan Mata Kuliah Wajib Kurikulum Perguruan Tinggi terhadap Penguatan Karakter Mahasiswa di Perguruan Tinggi.

1.4 Manfaat/Signifikansi Penelitian

1.4.1. Segi Teori

Penelitian ini berguna dalam pengembangan keilmuan Pendidikan Umum dan Karakter karena kebijakan dalam pengimplementasian MKWK agar berdampak terhadap karakter mahasiswa. Selain itu, penelitian tentang implementasi kebijakan MKWK dalam pembinaan karakter mahasiswa dapat memperkuat posisi Mata

Kuliah “analisis kebijakan pendidikan karakter abad 21 dan analisis kebijakan MKWK di perguruan tinggi”.

1.4.2. Segi Praktik

Penelitian ini berguna bagi dosen-dosen MKWK di berbagai perguruan tinggi karena mampu mengarahkan kembali hakikat dan tujuan penyelenggaraan perkuliahan plat merah tersebut. Sehingga mereka akan mampu mengembangkan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran yang sesuai dengan tujuan mata kuliah yang diampunya. Selain itu, pengelola dan pemegang kebijakan di perguruan tinggi akan mampu memiliki pemahaman yang akurat perihal penyelenggaraan MKWK sehingga kategorisasi sebagai “mata kuliah kelas dua” tidak terjadi.

1.4.3. Segi Kebijakan

Penelitian tentang implementasi kebijakan MKWK dalam pembinaan karakter mahasiswa diharapkan mampu memperkuat keberadaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84/E/KPT/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Mata Kuliah Wajib pada Pendidikan Tinggi, sehingga berbagai perguruan tinggi dengan karakteristik jati dirinya masing-masing tetap mampu melaksanakan MKWK sesuai dengan kehendak negara. Hal demikian dapat mendorong berbagai perguruan tinggi untuk mengembangkan kebijakan penyelenggaraan MKWK yang mampu memperkuat jati diri kampusnya dan selaras dengan kebijakan negara.

1.4.4. Segi Isu dan Aksi Sosial

Penelitian tentang implementasi kebijakan MKWK dalam pembinaan karakter mahasiswa diharapkan dapat membawa informasi baru dan *best practice* dalam pengelolaannya dengan membangun ekosistem dalam kerangka memperkuat eksistensinya. Selain itu, berbagai perguruan tinggi dapat melakukan kerja sama untuk mengadakan tridharma perguruan tinggi seperti penelitian dan pengabdian yang dilakukan secara terintegrasi dan bersama-sama untuk mengembangkan dan pembinaan pengelolaan MKWK yang lebih baik di Indonesia dalam rangka pembinaan karakter terhadap mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa dan pemegang estapet kepemimpinan bangsa dan negara di masa yang akan datang.

1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur penulisan disertasi tentang implementasi Mata Kuliah Wajib Kurikulum dalam pembinaan karakter mahasiswa yang diselenggarakan di sejumlah Perguruan Tinggi di Jawa Barat, disajikan dengan beberapa komponen penulisan sebagai berikut: Bab I tentang Pendahuluan, menguraikan beberapa hal mulai dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/*signifikansi* penelitian, hingga struktur organisasi penulisan disertasi. Bab II tentang Kajian Pustaka, membahas tinjauan tentang implementasi MKWK, pendidikan karakter dalam konteks pendidikan umum dan tinjauan penelitian terdahulu yang relevan dengan disertasi ini. Bab III tentang Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis informasi yang menjadi objek kajian meliputi desain penelitian, pemilihan partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Bab IV tentang Temuan dan Pembahasan, berusaha memaparkan hasil kajian di lapangan melalui berbagai data dan informasi serta pembahasan hasil penelitian yang memadupadankan data dengan kajian teori yang relevan. Pada bagian akhir Bab V menyajikan Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi yang dapat diberikan dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.